

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : IN.14/R/PP.00.9/2115/2011

TENTANG
NAMA-NAMA PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN INDIVIDU
DAFTAR ISIAN PENGGUNA ANGGARAN (DIPA)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2011

REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan penelitian Dosen di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, perlu diadakan penelitian individu;
2. bahwa berdasarkan hasil penerimaan proposal, telah terkumpul beberapa proposal individu yang akan dinilai dan diseleksi;
3. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi dari presentasi proposal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembayaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005, tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang Perubahan dari STAIN Cirebon menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010, tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0422/025-01.2/XII/2010 tanggal 31 Desember 2009, tentang Surat Pengesahan DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2011;
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2009, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama RI;
- Memperhatikan : Hasil rapat Pengurus Lembaga Penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon tanggal 02-08-2011 tentang surat usulan proposal penelitian individu DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG NAMA-NAMA CALON PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN INDIVIDU DAFTAR ISIAN PENGGUNA ANGGARAN (DIPA) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011;**
- Pertama : Menetapkan nama-nama calon penerima dana bantuan individu dan judul penelitiannya pada lampiran I;
- Kedua : Calon penerima dana bantuan individu DIPA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON Tahun Anggaran Tahun 2011 akan diseleksi substantif melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara;
- Ketiga : Penerima dana bantuan individu akan ditetapkan kemudian berdasarkan hasil seleksi substantif dan akan mendapatkan bantuan dana penelitian dari DIPA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON Tahun Anggaran 2011;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini;
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 03-08-2011
REKTOR,

Prof. Dr. H. Maksud, MA
NIP. 19540809 198803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pemeriksaan Keuangan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Up. Kepala Biro Keuangan dan BNN Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
5. Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Pelayanan Negara di Cirebon;
8. Para Pembantu Rektor di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
9. Kepala Biro AUAK IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
10. Dekan di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
11. Arsip

LAMPIRAN I**Nomor** : In.14/R/PP.00.9/2115/2011**Tanggal** : 03-08-2011**NAMA-NAMA PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN
(INDIVIDUAL)****DAFTAR ISIAN PENGGUNA ANGGARAN (DIPA) APBN-P
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	NAMA	JUDUL
1	DR.H. SLAMET FIRDAUS, MA NIP. 19571109 198803 1 002	Dimensi Khasyyah dan Musyahadah dalam Perspektif Ayat- Ayat Ihsan
2	DR.H. SUMANTA, M. Ag NIP. 19660516 199303 1 004	Tasawuf Kontemporer: Upaya Integrasi Dimensi Aqidah, Syari'ah dan Tasawuf
3	DR. SAEFUDIN ZUHRI, M.Ag NIP. 19710302 199803 1 002	Integrasi Pesantren Dan sekolah: Studi Terhadap Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional dan Modern di Cirebon
4	DR. AAN JAELANI, M.Ag NIP. 19750601 200501 1 008	Pengelolaan APBN Dan Politik Anggaran di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam
5	DR. H. ADIB, M.Ag NIP. 19740515 199803 1 003	Wacana Pluralisme Agama Dalam Kitab Tafsir Ibnu Kastir
6	DR.H. SAMSUDIN, M. Ag NIP. 19610328 199303 1 003	Teks-Teks Qath'i Dan Kelenturan Masalah: Munawir Syadzali Dalam Bingkai Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Thufi
7	DR. H. KOSIM, M. Ag NIP. 19640104 199203 1 004	Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
8	DR. ILMAN NAFI'A, M. Ag NIP. 19721220 199803 1 004	Nasionalisme Dalam Perspektif Pemikiran Keislamaan Keindonesiaan

**REKTOR,**

Prof. Dr. H. Maksum, MA.

NIP. 19540809 198803 1 001

19

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
No. In.14/F.II/PP.00.9/0912/2015

TENTANG

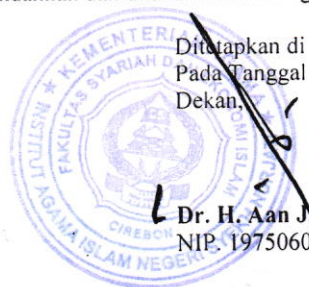
PENERIMA BIAYA PELAKSANAAN PENELITIAN INDIVIDU REGULAR DAN KOLEKTIF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2015

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang :**
- bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan penelitian Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, perlu diadakan penelitian individu reguler dan kolektif;
 - bahwa berdasarkan hasil penerimaan proposal, telah terkumpul beberapa proposal individu dan kolektif yang telah dinilai dan diseleksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Dekan;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi dari presentasi proposal.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
 - Surat Menteri Keuangan RI Nomor SP DIPA - 025.04.2.423532/2015 tanggal 14 November 2014 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2015 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon;
 - Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-39/MK.02/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama.
- Memperhatikan :**
- Berita Acara Seminar Proposal Penelitian dari Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tanggal 15 Juli 2015;
 - Berita Acara Presentasi Susulan Proposal Penelitian Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tanggal 13 Juli 2015;
 - Hasil rapat Pimpinan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon tanggal 31 Juli 2015 tentang usulan proposal penelitian reguler individual dan kolektif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang Penerima Biaya Penelitian Individual Reguler dan Kolektif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2015.
- PERTAMA :** Menetapkan penerima biaya penelitian individu reguler dan kolektif beserta judul penelitiannya sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Penerima biaya penelitian individu reguler Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2015 yang telah diseleksi secara substantif melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- KETIGA :** Penerima biaya penelitian individu reguler dan kolektif akan mendapatkan bantuan dana penelitian dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2015 dan diharuskan membuat laporan hasil penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- Kutipan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada Tanggal
Dekan

: CIREBON
: 12 Agustus 2015

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
NIP. 197506012005011008

Tembusan :

- Rector IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- Kepala Biro AUAK IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- Para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Lampiran I
 Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
 Nomor : In.14/F.II/PP.00.9/0912/2015
 Tanggal : 12 Agustus 2015

**DAFTAR PENELITIAN INDIVIDU REGULAR DAN PENELITIAN KOLABORATIF
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	KETERANGAN
1	Ahmad Rofi'i, MA	Pergeseran Paradigma Hukum Kewarisan Islam: Hak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan Maroko	Individu Reguler
2	Dr. H. Kosim, M.Ag	Eksistensi dan Peranan Peradilan Agama Kota Cirebon Jawa Barat dalam Penerapan Hukum Perdata Islam di Kota Cirebon	Individu Reguler
3	Dr. H. Samsudin, M.Ag	Hukum Mati di Indonesia: Tinjauan Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia	Individu Reguler
4	Leliya, MH	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelaksanaan PNPM-MPD (Studi Kasus di Kabupaten Cirebon)	Individu Reguler
5	Ibi Satibi, M.Si	Tradisi Rasulan dan Perkawinan di Desa Ujung Gebang Kec. Susukan Kab. Cirebon	Individu Reguler
6	Achmad Otong Busthomi, Lc, M.Ag	Masjid dan Pemberdayaan Ekonomi (Studi kasus di Masjid Al Munawwaroh) Desa Ujungaris – Widasari - Indramayu	Individu Reguler
7	Nining Wahyuningsih, SE, MM	Pengaruh Quality of Work Life terhadap Kepuasan Kerja Dosen (Studi Kasus pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon)	Individu Reguler
8	Alvien Septian Haerisma, MSI	Studi Komparatif Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat	Individu Reguler
9	Toto Suharto, M.Si	Implementasi Nilai-nilai Islami dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah di Kota Cirebon)	Individu Reguler
10	Izudin, MA (Ketua) Ahmad Ibrizul Izzi (Anggota) Ahmad Rifqi Abdillah (Anggota) Safrudin (Anggota)	Urgensi Kurikulum berbasis Integritasi Ilmu pada pengembangan Jurusan Ahwal Assyakhsyiah	Kolaboratif
11	Eef Saefullah, M.Ag (Ketua) H. Juju Jumena, MH (Anggota) Assa Fito (Anggota) Arifin (Anggota)	Analisis terhadap Penerapan Kurikulum pada Program Studi Muamalah Respon Mahasiswa Muamalah terhadap Penerapan Kurikulum yang Sedang Berlaku	Kolaboratif
12	Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag (Ketua) Ridwan Widagdo, M.Si (Anggota) Ayu (Anggota) Eva (Anggota) Anggi (Anggota)	Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Kontek Ekonomi Islam terhadap Pengembangan Kurikulum Jurusan Perbankan Syariah	Kolaboratif



Dekan,

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
 NIP. 19750601 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**KONTRAK PRESTASI
BANTUAN DANA PENELITIAN ANGGARAN DIPA TAHUN 2015**

Nomor : In.14/F.II/PP.009/0912/2015

Pada hari ini, Selasa..., tanggal 25, bulan Agustus..., tahun 2015, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag**
NIP : 19750601 200501 1 008
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam – IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, yang bertindak selaku dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

2. Nama : **Dr. H. Kosim, M.Ag**
NIP : 19640104 199203 1 004

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, yang bertindak selaku dan atas nama pribadi penerima dan atau pengguna dana bantuan penelitian Tahun 2015.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyetujui dan menyepakati hal-hal berikut:

Pertama

Persetujuan dan kesepakatan dilakukan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersifat mengikat.

Kedua

Sesuai dengan DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2015 dan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: In.14/F.II/PP.00.9/0912/2015, PIHAK KEDUA menerima dana bantuan penelitian sebesar Rp. 9.000.000,- bagi penelitian individu reguler dan Rp. 15.000.000,- bagi penelitian kolektif dan dipotong pajak sesuai dengan golongan peneliti.

Ketiga

PIHAK KEDUA wajib menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana penelitian sesuai dengan besar dana yang diterima dan RAB disusun secara rinci sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat

Pembayaran dana bantuan penelitian dilakukan setelah PIHAK KEDUA melengkapi persyaratan administrasi yang telah atau akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Kelima

Bantuan dana sebagaimana disebut pada poin kedua digunakan sepenuhnya untuk keperluan kegiatan penelitian PIHAK KEDUA.

Keenam

Pelaksanaan penelitian sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dengan keharusan mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku

Ketujuh

Yang dimaksud tanggung jawab pada poin delapan adalah menyerahkan laporan hasil akhir penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang meliputi:

1. Tiga eksemplar hasil akhir penelitian dengan *hardcopy* warna kuning;
2. *Executive summary* ditulis 20-25 halaman;
3. Hasil akhir penelitian dan *executive summary* diserahkan dalam bentuk *hard* dan *softcopy* (CD);
4. Hasil akhir penelitian dan *executive summary* ditulis dengan menggunakan kertas ukuran A4, jenis font/huruf Times New Roman, besar font/huruf 12, spasi 1,15, dan margin kiri-bawah 3 cm dan atas-kanan 2,54 cm;
5. Penelitian terbaik akan dimuat di jurnal ilmiah HOLISTIK;
6. Hasil penelitian PIHAK KEDUA menjadi hak milik dan atau merupakan property PIHAK PERTAMA;

Kedelapan

Laporan hasil pelaksanaan penelitian yang dibuat oleh PIHAK KEDUA harus sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA paling lambat Tanggal 30 Oktober 2015.

Kesembilan

PIHAK KEDUA harus mempresentasikan hasil penelitiannya sebagai bentuk pertanggung-jawaban intelektual dalam Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA atau melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Kesepuluh

Keberhasilan dan kegagalan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan bantuan ini akan mempengaruhi reputasi PIHAK KEDUA dalam penilaian PIHAK PERTAMA.

Kesebelas

Apabila PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan penelitiannya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan

seluruh hak-haknya kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menunjuk pihak lain untuk meneruskan atau melakukan penelitian PIHAK KEDUA.

Keduabelas

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjalanan ini, jika dipandang perlu oleh Kedua Pihak dapat diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang diletakkan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

Peneliti,



Dr. H. Kosim, M.Ag

NIP. 19640104 199203 1 004

PIHAK PERTAMA

Dekan Fak. FSEI,

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.

NIP. 19750601 200501 1 008

SAKSI-SAKSI

SAKSI KEDUA

Kabag TU,

Dra. Oon

NIP. 19660906 199703 2 002

SAKSI PERTAMA

Wakil Dekan II,

Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag.

NIP. 19570909 198303 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sebagai laporan;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
3. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan;
4. Arsip.

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

EXECUTIVE SUMMARY PENELITIAN



Oleh

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 196401041992031004

**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**

2011

ABSTRAK

Kepemimpinan perempuan dalam rana politik dan perspektif hukum Islam menjadi polemik. Hal ini menjadi sesuatu yang krusial untuk didiskusikan antara individu yang membuatnya menjadi isu yang marginal dan individual yang melegalkannya. Akar rumput *pertama* dari masalah ini dimengerti mengenai Al-Quran surat Al-Nissa' (Q.S.4) ayat 34 dan Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita. Kontroversi seputar boleh tidaknya seorang perempuan menjadi presiden seakan tak ada habisnya. Terlepas dari fakta-fakta konkrit di atas, benarkah Islam, sebagaimana yang kini dikatakan oleh parpol-parpol Islam dan para intelektual muslim, tidak lagi mempersoalkan apakah wanita boleh atau tidak menjadi presiden?

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Islam dan hak-hak Perempuan ? Bagaimana Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fiqh Siyasah ? adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan kepada kita tentang bahwa dalam Islam persoalan hak-hak perempuan telah secara dibahas secara luas para yuris Islam, juga terdapat perbedaan pendapat para ulama terkait dengan masalah hukum perempuan menjadi pemimpin dan kepemimpinan perempuan dalam perspektif fiqh siyasah, hukumnya bagaimana ? metode ijtihad apa yang digunakan, dalam situasi dan kondisi yang bagaimana sehingga mereka berbeda pendapat mengenai hukum seorang perempuan sebagai pemimpin dan kepemimpinan perempuan dalam perspektif fiqh siyasah

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Metode yang gunakan oleh penulis adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa masa sekarang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penulis dapat mengetahui gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta gejala yang sudah diselidiki

Dari hasil penelitian penulis dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah dapat disimpulkan sebagai berikut: tentang masalah Islam dan hak-hak Perempuan bahwa Menurut pandangan Islam, bahwa perempuan berhubungan dengan kepemimpinan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih yang walaupun terdapat berdedaan pendapat dalam masalah ini, tentangKepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah terdapat beberapa pendapat Ulama siyasah syar'iyah sunni klasik sebagian mensyaratkan harus laki-laki seperti Imam al-Ghazali, dan sebagian lagi tidak mensyaratkan harus laki-laki seperti al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah, Di masa sekarang ini, masi terdapat perbedaan pendapat terkait dengan Kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah, ada yang tetap tidak membolehkan dengan alasan seperti yang digunakan oleh fuqaha dan ada juga yang membolehnya serta sebagian lagi memperjuangkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin publik dengan kajian gendernya. ,Perjuangan supaya perempuan setara dengan laki-laki dalam persoalan kepemimpinan sampai saat sekarang sedang diperjuangkan oleh para aktifis-aktifis perempuan baik di Negara-negara Islam maupun Negara-negara barat

Peneliti : H. Kosim

Email ; kosimrusdi @gmail.com

Kata Kunci : Kepemimpinan dan fiqh siyasah

BAB I

PENDAHULUAN

Kepemimpinan perempuan dalam rana politik dan perspektif hukum Islam menjadi polemik. Hal ini menjadi sesuatu yang krusial untuk didiskusikan antara individu yang membuatnya menjadi isu yang marginal dan individual yang melegalkannya. Akar rumput *pertama* dari masalah ini dimengerti mengenai Al-Quran surat Al-Nissa' (Q.S.4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِيفَظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Kedua, hadits “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita”. (HR Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dan an-Nasa’i dari Abu Bakrah ra)

Kontroversi seputar boleh tidaknya seorang perempuan menjadi presiden seakan tak ada habisnya. Tapi sekarang fokusnya tidak seperti beberapa waktu menjelang pemilu dan beberapa saat sebelum Sidang Umum MPR R.I tahun 1999 lalu yang diwarnai oleh penolakan keras khususnya dari kalangan parpol-parpol Islam tentang kemungkinan wanita menjadi presiden. Kini parpol-parpol Islam itu telah “merevisi” pendapatnya. Melalui berbagai rekayasa konstruktif, mereka mencoba mengesahkan kepemimpinan wanita dalam konteks negara.

Presiden Partai Keadilan, M. Hidayat Nurwahid pun mengatakan, “Sejak dulu sesungguhnya umat Islam menerima presiden wanita asal sesama muslim.” (Media Indonesia

3/3/2001). Bahkan menurut tokoh PDI-P Soetardjo Soerjoguritno, Amien Rais, Hamzah Haz dan bahkan Ahmad Soemargono yang sebelumnya dikenal gigih menentang kepemimpinan Megawati, telah bersumpah mendukung Megawati sebagai presiden Indonesia sampai 2004 (Rakyat Merdeka, 7/3/2001). Sikap ini didukung oleh Nurcholish Madjid dengan mengatakan bahwa sebagian besar ulama tidak mempersoalkan naiknya wanita sebagai presiden/kepala negara. Hanya sebagian kecil dari mereka yang melarang wanita menjadi presiden. Sementara itu, KH Salahuddin Wahid, dalam sebuah dialog yang diselenggarakan di Mesjid Universitas Indonesia, pada 13/7/2001, menyatakan, hendaknya umat Islam Indonesia bisa menerima kehadiran Megawati sebagai kepala negara. Sebab, penolakan Islam terhadap kepemimpinan perempuan bukanlah harga mati.

Rekayasa konstruktif untuk mengegolkan ide keabsahan kepemimpinan perempuan dalam entitas negara ini juga terlihat dalam seminar sehari yang diselenggarakan di komisi VII DPR R.I pada tanggal 4/7/2001. Seminar yang menghadirkan Nazaruddin Umar dan KH. Husein Mohamad itu bertujuan memberikan legitimasi syari'ah terhadap keabsahan kepemimpinan wanita dalam konteks negara. Meskipun demikian, seminar itu lebih tepat disebut sebagai rekayasa untuk mencairkan hambatan-hambatan teologis yang kerap kali berujung pada pemerkosaan nash-nash agama dengan kepentingan-kepentingan politik.

Terlepas dari fakta-fakta konkrit di atas, benarkah Islam, sebagaimana yang kini dikatakan oleh parpol-parpol Islam dan para intelektual muslim, tidak lagi mempersoalkan apakah wanita boleh atau tidak menjadi presiden?

Perbedaan pendapat beberapa tokoh masyarakat akhir-akhir ini, tentang boleh tidaknya seorang wanita menjadi presiden, menarik untuk dicermati. Kongres umat Islam II tahun 2004 yang diadakan di Jakarta, mendapat sorotan dari berbagai kalangan, khususnya oleh para pengamat yang tidak lepas dari kepentingan politik golongan yang diperjuangkan. Sebagian besar para peserta kongres menginginkan diberlakukannya penentuan pemilihan presiden, minimal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mereka menyampaikan pemikirannya sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fikih) bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi presiden, atau yang lazim disebut dalam bahasa agamanya adalah : *raisul jumhuriyah* atau *sulthan* atau *imam* atau *waliyul-amri* Keinginan beberapa bagian dari komponen bangsa tersebut, juga untuk memperjuangkan formalisasi syariat dalam tataran hukum positif di Indonesia. Mereka beralasan, karena mengingat mayoritas

penduduk Indonesia beragama Islam, juga sebagai tanggung jawab kelak di hadapan Allah SWT. Tentunya dalam setiap langkah, bahwa pertimbangan ukhrawi tidak bisa diabaikan dalam pengambilan sikap yang akan menentukan urusan duniawi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Ijtihad dan Perubahan Hukum

Ijtihad artinya mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban.¹ Usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh *mujtahid* untuk mencapai suatu putusan syara' (hukum Islam) tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam *al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasulullah saw.²

Al-Suyuti mengajukan pernyataan :³ Bahwa hukum ijtihad adalah *fardhu kifayah*. alasannya, karena nas sudah tidak turun lagi, sedangkan masalah-masalah baru selalu muncul, oleh karena itu menurutnya harus ada (*fardhu kifayah*) setiap zaman seorang mujtahid terpenuhi syarat-syaratnya.⁴

selanjutnya al-Suyuti menyatakan, bahwa ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad, maksudnya bahwa ijtihad yang telah disepakati sebelumnya tidak dapat diganggu gugat atas ijtihad yang baru, karena kedudukan masing-masing hasil ijtihad sama, karena itu masing-masing ijtihad tidak ada yang lebih istimewa, sehingga masing-masing tidak bisa membatalkan. Walaupun demikian bisa juga hasil ijtihad dibatalkan oleh ijtihad yang lain dengan ketentuan : *Pertama*, ijtihad yang kedua lebih kuat dari pada ijtihad pertama, misalnya qaul jadid Imam Syafi'i dapat mengubah qaul qodimnya. *Kedua*, ijtihad terdahulu tidak relevan dengan kondisi atau keadaan yang dihadapi dewasa ini, sehingga hasil ijtihad tersebut perlu direvisi. Kaidah Fiqhiyah menyatakan :

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد⁵

¹Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abdul Qodir al-Razi, *Mukhtar al-Shiyakh*, (Beirut :Maktabah Libanon, 1995), juz 1, hlm. 48. Muhammad Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Bairut : Dar al-Fikr, t.t), juz 3, hlm. 435

²Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Jilid 2*, hlm. 661

³Abdurahman Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad al-Suyuti, *Tafsir Ijtihad*, (Iskandariyah : Dar al-Dawah, 1403 H) cet. ke-1, juz 1, hlm. 29-35

⁴*Ibid.*

⁵Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayub al-Dimsyazi, *I'lam al-Muaqqiin*, (Bairut : Dar al-Jil, 1973 M), juz. ke-2, hlm. 425

"Perubahan fatwa dan perbedaannya itu didasarkan perubahan zaman, tempat keadaan, niat dan adat "

2. Teori Keragaman Perkembangan Pemikiran

Teori Keragaman Perkembangan Pemikiran ini diajukan oleh David Émile Durkheim dilahirkan di Épinal, Prancis 15 April 1858 /w15 November 1917 dan Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896-1980 M.

David Émile Durkheim menyatakan, bahwa bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya di masa modern, ketika hal-hal seperti latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi. Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern, Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial. Bersama Herbert Spencer Durkheim adalah salah satu orang pertama yang menjelaskan keberadaan dan sifat berbagai bagian dari masyarakat dengan mengacu kepada fungsi yang mereka lakukan dalam mempertahankan kesehatan dan keseimbangan masyarakat suatu posisi yang kelak dikenal sebagai *funksionalisme*.⁶

⁶[www. Teori Keragaman. com](http://www.TeoriKeragaman.com), [http : // . Wikipedia. Org/wiki](http://Wikipedia.Org/wiki).

BAB II

ISLAM DAN HAK-HAK PEREMPUAN

Karena keragaman peran, maka kaum perempuan dalam kehidupan sosial memiliki beragam hak pula. Misalnya, hak waris untuk ibu dan anak perempuannya tidak bisa sama.

a. Hak Ibu.

Diantara hak-hak paling fundamental bagi perempuan yang ber-peran sebagai ibu, seperti dikemukakan di atas, adalah hak menda-patkan kepatuhan, ketaatan dan penghormatan dari semua anaknya (Qs. 31:14).

Hak waris untuk ibu adalah sebagaimana diungkapkan dalam ayat Alqur'an: "*Hak untuk ibu dan ayah adalah 1/6 jika yang meninggal [yakni, anak mereka] mempunyai anak. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak [dan tidak mempunyai sudra], maka hak ibu dan ayah ialah 1/3. Bila yang meninggal itu tidak mem-punyai anak tetapi mempunyai saudara, maka hak untuk ibu dan ayah hanya 1/6*" (Qs. 4:11).

b. Hak Perempuan sebagai Istri.

Sebagai isteri, kaum perempuan mempu=nyai beberapa hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. Diantaranya adalah bahwa di awal pernikahan, isteri berhak mendapatkan mas kawin (*mahar*) dari suaminya (Qs. 4:4). Per-kawinan hanya boleh dilangsungkan atas dasar mupakat kedua belah pihak, atas dasar suka rela, bukan karena paksaan – terutama paksaan dari orang tua (Qs. 4:19).

Hak fundamental bagi perempuan yang berperan sebagai isteri ialah hak mendapatkan perlakuan yang layak dari suaminya (Qs. 2:228). Setelah hak-haknya dipenuhi, isteri berkewa-jiban mema-tuhi suaminya. Bila isteri telah me-nunaikan kewajibannya tetapi hak-haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, maka isteri berhak mengajukan cerai (Qs. 2:229).

Istri pun berhak mendapatkan perlin-dungan dari suaminya. Dalam kata lain, suami berkewajiban melindungi isterinya sebab suami (laki-laki) adalah pelindung perempuan (isteri). Laki-laki [dalam hal ini, suami] memikul kewa-jiban sebagai pelindung perempuan [isteri] ka-rena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki [suami], yakni kelebihan secara *fisik*, dan suami berkewajiban menafkahi isterinya (Qs. 4 : 34). Dus, laki-laki jangan angkuh ka-rena kelebihan yang dimilikinya sebab kelebihan itu selaras dengan

kewajibannya [sebagai pelindung, bukan penguasa]. Berbicara soal kelebihan, perempuan pun mempunyai kelebihan, yaitu kelebihan secara *mental*. Para ahli psikologi sepakat bahwa kaum perempuan memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang lebih besar [lebih kuat] – terutama kasih sayang kepada anak – daripada kaum laki-laki. Di sinilah, antara lain, pentingnya membina rumah tangga. Suatu rumah tangga berarti suatu kesatuan kekuatan fisik [suami] dan mental [isteri] untuk meraih kebahagiaan.

Hak isteri atas harta warisan peninggalan suaminya – setelah semua utang dibayar dan wasiat ditunaikan – adalah $\frac{1}{4}$ jika mereka (suami-isteri) tidak mempunyai anak. Bila mempunyai anak, maka hak isteri hanya $\frac{1}{8}$ (Qs. 4:12).

Isteri – bila telah bercerai dan telah habis masa *iddah*-nya – berhak untuk rujuk kembali dengan suaminya (Qs. 2:231 dan 65:6).

Perempuan yang diceraikan suaminya berhak memperoleh *mut'ah* (“kompensasi”) dari mantan suaminya sebatas kemampuan mantan suaminya itu (Qs. 2:241).

c. Hak Perempuan sebagai Anak.

Seperti anak laki-laki saja, anak perempuan mempunyai hak yang sama. Terutama sekali ialah hak untuk hidup (Qs. 17:31) Dinyatakan pula di dalam Alqur'an (Qs. 81:8-9) bahwa orang tua yang membunuh anaknya, di Hari Kiamat tidak akan banyak ditanya oleh Allah. Anak yang dibunuh akan dihadirkan di hadapan orang tuanya. Lalu si anak ditanya oleh Allah mengapa dia dibunuh. Setelah itu, si anak menuntut balas terhadap orang tuanya.

Selain hak hidup, anak perempuan – seperti anak laki-laki saja – mempunyai hak waris. Menurut ketentuan Alqur'an (Qs. 4:11) hak waris untuk anak laki-laki adalah dua kali lipat untuk anak perempuan. Tegasnya, bila anak laki-laki mendapatkan dua, anak perempuan memperoleh satu. Bila anak yang ditinggalkan oleh almarhum adalah perempuan semuanya dalam jumlah lebih dari dua orang, maka bagian untuk mereka adalah $\frac{2}{3}$. Bila anak perempuannya hanya satu orang, maka dia memperoleh $\frac{1}{2}$.”

Mungkin dipertanyakan, mengapa anak laki-laki mendapatkan harta dua kali lipat dari anak perempuan. Bukankah ini pembagian yang tidak adil, seolah-olah ada superioritas laki-laki atas perempuan? Jawabannya ada dua. *Pertama*, bahwa tentang keadilan Allah lebih tahu daripada manusia. *Kedua*, anak laki-laki akan menanggung kewajiban lebih berat daripada anak perempuan, terutama bila dia sudah dewasa. Diantara kewajiban berat bagi laki-laki adalah: memberikan mas kawin kepada isteri-nya, menafkahi

keluarga, berperang dan berke-wajiban melindungi saudaranya yang perempuan-an. Jadi, sebagaimana telah berulang kali saya tegaskan, dalam Islam setiap hak disertai kewajiban. Dalam kata lain, besar dan kecilnya hak yang diperoleh seseorang ditentukan oleh berat dan ringannya kewajiban yang dia pikul. Itulah keadilan sejati. Dus, keadilan itu tidak berarti harus “sama”, tetapi harus “sepadan” (*equal*). Prinsip yang benar ialah bukan prinsip persamaan tetapi prinsip kesepadanan atau kesetaraan (*equality*). Sekedar contoh sederhana, apakah adil bila ukuran pakaian si kakak [sebut saja dia berumur 15 tahun dan tak soal apakah dia laki-laki atau perempuan] harus sama dengan ukuran pakaian untuk adiknya [sebut saja, mi-salkan, umurnya baru 5 tahun? Bila mereka diberi pakaian yang ukurannya sama, itu justru tidak adil!

Hak fundamental lainnya untuk anak perempuan – seperti untuk anak laki-laki juga – adalah hak mendapatkan perlakuan yang layak dari orang tuanya. Banyak Hadits mengenai hal ini, diantaranya sebagai berikut.

“Siapa yang mempunyai dua anak perempuan dan memeliharanya sampai dewasa, maka dia akan berada di Sorga sejajar denganku [beliau mengisaratkan dengan dua jari tangan-nya]” (Muslim).

“Siapa yang mempunyai anak perempuan lalu dia tidak menguburnya hidup-hidup, tidak memperlakukanya secara zalim serta tidak mengutamakan perlakuan terhadap anak laki-laki, maka dia akan dimasukkan ke dalam Sorga” (Abu Dawud).

“Siapa yang dirugikan oleh anak perempuannya tetapi dia tetap memperlakukan anaknya itu dengan baik, maka anak perempuannya itu akan menjadi praisai bagi orang tuanya untuk menghalangi orang tuanya masuk Neraka” (Bu-khori-Muslim).

d. Hak Saudari

Hak waris untuk saudara perempuan (saudari) adalah begini. Bila orang yang meninggal (laki-laki atau perempuan) tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara seibu atau seorang saudari seibu, maka bagian untuk saudara/i itu ialah 1/6. Tetapi bila saudara/i itu lebih dari seorang, maka bagian untuk mereka semua ada-lah 1/3 dibagi bersama-sama” (Qs. 4:12).

“Bila seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak tetapi hanya mempunyai seorang saudara perempuan (saudari), maka bagi saudarinya itu ½ dari harta peninggalan al-marhum. Bila saudari almarhum itu lebih dari seorang, maka bagian mereka

ialah 2/3. Bila al-marhum mempunyai saudara dan saudari, maka untuk saudara mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian untuk saudaranya” (Qs. 4:176).

e. Hak Memberikan Kesaksian

Perempuan pun berhak memberikan kesaksian. Dalam memberikan kesaksian diperlukan [idealnya] kesaksian dua orang laki-laki. Bila tidak ada, boleh dengan seorang laki-laki dan dua perempuan (Qs. 2:282).

Bila seorang perempuan [dalam statusnya sebagai isteri] dituduh berzina oleh suaminya, tetapi dia [si isteri] tidak menerima tuduhan itu, maka dia berhak menyatakan penolakan atas tuduhan tersebut dengan empat kali bersumpah atas nama Allah yang disusul dengan sumpah terakhir [kelima] yang disebut “Sumpah Ku-tukan” – yang dalam hukum Islam diistilahkan dengan Sumpah *Li'an* [sumpah laknat]”. Artinya, dia [si isteri] bersumpah bahwa dia berani duku-tuk oleh Allah bila tuduhan suaminya itu benar [yakni, benar bahwa si perempuan itu berzina]. Tetapi bila tuduhan suaminya itu salah [yakni, si perempuan itu tidak berzina], maka kutukan Allah itu atas suaminya (Qs. 6-9).

f. Hak Perempuan terhadap Kepemilikan Harta.

Perempuan, seperti laki-laki juga, mempunyai hak untuk memperoleh, menggunakan dan menikmati hartanya. Harta yang diperoleh perempuan bisa melalui beberapa cara (jalan), di antaranya diperoleh dari: mahar [mask kawin], usaha sendiri, hadiah, harta wasiat dan harta warisan.

g. Hak Pendidikan

Seperti kaum laki-laki, kaum perempuan pun berhak mengenyam pendidikan. Allah menganjurkan kepada orang beriman baik laki-laki maupun perempuan untuk memohon diberi dan ditambah ilmu (Qs. 9:122). Allah pun menjanjikan bahwa siapa yang beriman dan berilmu – tak soal apakah laki-laki atau perempuan – dia akan diangkat martabatnya (Qs. 58:11).

Nabi Saw menyatakan bagi mencari ilmu bukan hanya sebagai hak tetapi merupakan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan (*Ibn Ma-jah*). Nabi Saw juga menjamin bahwa siapa saja yang mempunyai tiga orang anak gadis lalu mereka diajari soal etika dan budaya, lalu menikahkan mereka dan memperlakukan mereka dengan baik, maka balasannya adalah Sorga (*Abu Dawud*).

h. Hak Berpartisipasi dalam Jihad, Profesi dan Urusan Publik

Allah menyatakan bahwa orang buta, cacat dan sakit diperbolehkan tidak ikut berperang (Qs. 48:17). Ayat ini tidak mencantumkan perempuan. Ini berarti bahwa perempuan pun harus berpartisipasi dalam jihad sekalipun, tentu saja, tidak selalu yang disebut jihad itu menghunus pedang atau memegang senjata. Anas ra. Meriwayatkan bahwa Nabi Saw mengikutsertakan Ummu Sulaim dan beberapa perempuan Ansar lainnya dalam berjihad. Di medan perang, biasanya kaum perempuan berpelembut sebagai pengurus dapur umum dan menjadi perawat prajurit yang terluka dan yang sakit (Hadits *Muslim*).

Secara implisit, Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa kaum perempuan berhak untuk berpartisipasi di bidang profesi dan bidang publik (sosial-politik). Logikanya, di masa perang saja mereka berhak terlibat, apatah lagi di masa damai [di luar medan perang]. Namun, di medan perang pun kaum perempuan harus dilindungi. Nabi Saw melarang membunuh perempuan dan anak-anak (*Bukhari-Muslim*)

i. Hak Perlindungan Kehormatan

Kaum perempuan berhak memperoleh perlindungan kehormatan. Dalam kata lain, kaum laki-laki tidak berhak memperlakukan kaum perempuan dengan semena-mena. Allah, misalnya, berfirman:

“Kaum laki-laki yang menuduh perempuan suci berzina, tetapi tidak bisa mengajukan empat orang saksi untuk menopang tuduhan-nya itu, maka tuduhannya itu harus ditolak dan dia [penuduh] harus dijatuhi hukuman cambuk 80 kali lecutan sebab laki-laki seperti itu telah melakukan pelanggaran [yakni: merendahkan/ mencemarkan martabat perempuan]” (QS. 24:4) Dengan ayat ini saja kaum laki-laki beriman tidak akan berani melecehkan kaum perempuan.

Untuk menghormati martabat perempuan, kaum laki-laki diwajibkan menjaga pandangan dan kemaluannya (Qs. 24:30). Tetapi kewajiban ini hanya bisa diwujudkan bila kaum perempuan pun bersikap sama, yakni menjaga pandangan dan kemaluannya. Bahkan, demi kemuliaan martabat kaum perempuan, Allah melarang kaum perempuan menampakan perhiasan kepada selain muhrimnya (Qs. 24:31). Kata “perhiasan” di sini tentu saja tidak hanya sekedar berupa aksesoris kaum perempuan seperti perhiasan emas, perak, dsb. Tetapi lebih dari itu adalah organ-organ tubuh yang dapat – bahkan mudah – merangsang birahi lelaki. Di sinilah pentingnya perempuan mengenakan pakaian yang sopan, artinya pakaian yang tidak merangsang syahwat laki-laki (Qs. 33:59).

Sedemikian luhurnya perlakuan Islam terhadap kehormatan kaum perempuan sehingga kaum laki-laki dilarang memasuki rumah se-orang perempuan bila suami si perempuan itu tidak ada di dalam rumahnya. Bahkan Islam melarang seseorang memasuki rumah orang lain tanpa seijin pemiliknya (Qs. 24:27).

Kebiasaan kaum perempuan modern [biasanya dengan dalih “kebebasan”] menampakan perhiasannya – bahkan organ-organ tubuhnya yang sangat sensitif terhadap birahi lelaki – bukan saja merupakan tindakan asusila [amoral], tetapi juga merupakan tindakan yang justru merendahkan martabat dan kehormatan perempuan itu sendiri.

j. Keringanan bagi kaum Perempuan

Menurut hukum Islam, kaum perempuan memperoleh beberapa hak keringanan, di antaranya:

- Perempuan yang sedang menstruasi tidak diwajibkan shalat dan puasa.
- Perempuan yang sedang menyusui anaknya dan perempuan yang sedang hamil tidak diwajibkan berpuasa.
- Perempuan yang sedang menstruasi tidak diwajibkan melakukan ritual haji seperti *Thawaf*.
- Perempuan, sekalipun dalam kondisi suci, tidak sedang mens, tidak diwajibkan shalat Jum'at berjamaah. Bagi perempuan, shalat Jum'at berjamaah bersifat opsional: boleh di rumah atau di masjid.
- Perempuan yang sedang mens tidak diwajibkan [bahkan dilarang] melayani hubungan seksual dengan suaminya.

BAB III

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Substansi kepemimpinan politik dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar “ahli”, berkualitas dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur dan bermoral baik. Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin agar dapat membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tenteram.⁷ Hal inilah yang membuat Islam tidak menerima pandangan Vilfredo Pareto, ahli politik Italia, yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan politik hanya sekedar persoalan siapakah yang berkuasa.⁸

Di samping itu, pemimpin juga harus orang yang bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan ini sebagai acuan dalam melihat sosok pemimpin yang benar-benar akan menjalankan amanah. Bagaimana mungkin pemimpin yang tidak bertakwa dapat melaksanakan kepemimpinannya? Karena dalam terminologinya, takwa diartikan sebagai melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Takwa berarti taat dan patuh serta takut melanggar/mengingkari dari segala bentuk perintah Allah.

Sebagai kitab suci agama Islam yang mengandung perintah dan aturan dari Allah, Alquran juga menyinggung masalah kepemimpinan. Dalam kisah pengangkatan Thalut sebagai raja untuk berperang melawan Jalut yang direkam oleh Alquran,⁹ segelintir masyarakat menolak Thalut untuk menjadi raja mereka karena dianggap bukanlah dari kalangan orang kaya. Namun Thalut memang layak menjadi pemimpin karena ia dianugerahi Tuhan kelebihan ilmu pengetahuan dan jasmani. Pada akhirnya, memang Thalut pantas menjadi pemimpin karena ia berhasil mengalahkan pihak agresor yang dipimpin oleh Jalut. Dari sinyalemen Alquran tersebut, kita bisa menilai bahwa faktor ilmu pengetahuan dan jasmani merupakan dua hal yang penting dalam memilih seorang pemimpin yang baik.

Di bawah ini pendapat para ulama Sunni dan Syi'ah yang berhubungan dengan kepemimpinan

1. Sunni

⁷ Mukhlis Zamzami Can, “Profil Pemimpin Islam”, dalam www.eramuslim.com

⁸ K.J. Veeger, *Realitas Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 82.

⁹ Lihat QS. Al-Baqarah: 246-250

Yurisprudensi Islam klasik, Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam merumuskan teori dan konsep yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan menurut Islam. Pada *masterpiece*-nya yang bertitel *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menyatakan bahwa kepemimpinan (*imamah*) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang wajib *fardlu kifayah* secara syara' dan tidak hanya secara rasional.¹⁰

Pada proses pemilihan seorang imam, jika belum ada seorang pemimpin, maka dibentuk terlebih dahulu dewan pemilihan (*ahl al-ikhtiyar/ahlul aqdi wal halli*) dan ditentukan para kandidat pemimpin. Orang-orang yang menjabat dalam dewan pemilihan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Adil yang mencakup segala aspeknya;
- b. Memiliki ilmu pengetahuan yang bisa dipergunakan untuk mengetahui siapa yang betul-betul berhak untuk menjabat sebagai pemimpin sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- c. Memiliki pandangan yang luas dan kebijaksanaan agar betul-betul bisa memiliki siapa yang paling layak untuk menjabat sebagai pemimpin, yang paling memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengatur kemaslahatan umat. Karena itulah, pemimpin yang baik adalah seorang warga negara setempat yang betul-betul mengenal karakter dan kondisi negaranya.¹¹

Sedangkan kandidat pemimpin, menurut al-Mawardi, harus memenuhi tujuh persyaratan, yaitu:¹²

- a. Adil yang meliputi segala aspeknya.
- b. Berilmu pengetahuan sehingga mampu membuat keputusan yang tepat (*berijtihad*) terhadap berbagai peristiwa dan hukum yang timbul.
- c. Sehat indranya, seperti penglihatan, pendengaran, dan lisannya agar ia mampu mengetahui langsung persoalan yang dihadapi.

¹⁰ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi (al-Mawardi), *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hal. 3

¹¹ *ibid.*, hal. 4.

¹² *Ibid.*, hal. 5

- d. Anggota tubuhnya normal dan tidak cacat. Karena jika cacat, hal itu akan menghalanginya untuk bergerak dan bertindak dengan cepat.
- e. Memiliki kecerdasan yang membuatnya mampu mengatur rakyat dan mengelola kepentingan publik (*al-mashlahah*).
- f. Keberanian dan ketegasan sehingga mampu melindungi pihak yang lemah dan menghadapi musuh.
- g. Keturunan dari suku Quraisy, berdasarkan hadis *Para pemimpin berasal dari Quraisy*.

Sel¹³ ain al-Mawardi, Ibnu Khaldun juga menguraikan syarat-syarat kepemimpinan (*imamah*) dalam kitab *Muqaddimah*-nya. Syarat-syarat itu adalah:¹⁴

- a. Pengetahuan
- b. Keadilan
- c. Kesanggupan (*capability*)
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Keturunan Quraisy

Terkait dengan kriteria atau syarat pemimpin, khalifah Abu Bakar Assiddiq ra pernah berpidato saat dilantik menjadi pemimpin umat sepeninggal Rasulullah Saw. Inti dari isi pidato tersebut dapat dijadikan pandangan dalam memilih profil seorang pemimpin yang baik. Isi pidato tersebut diterjemahkan sebagai berikut:

“Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya. Untuk itu jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku. Sifat jujur itu adalah amanah, sedangkan kebohongan itu adalah pengkhianatan. ‘Orang lemah’ di antara kalian aku pandang kuat posisinya di sisiku dan aku akan melindungi hak-haknya. ‘Orang kuat’ di antara kalian aku pandang lemah posisinya di sisiku dan aku akan mengambil hak-hak mereka yang mereka peroleh dengan jalan yang jahat untuk aku kembalikan kepada yang berhak menerimanya. Janganlah di antara kalian meninggalkan jihad, sebab kaum yang

¹³H.R. Nasa’i, Ahmad, Hakim, Baihaqi, Thabrani, dan Abu Ya’la. Lihat misalnya, hadis riwayat Nasai no. 5942 pada Ahmad bin Syu’aib Abu Abdurrahman an-Nasa’i, *Musnad an-Nasa’i al-Kubra*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1991), juz 3, hal. 467. Redaksinya hadis sebagai berikut:

الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقاً ولكم عليهم حقاً أما إن استرحموا رحموا وإن عاهدوا وفوا وإن حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعن والملأه والناس أجمعين

¹⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, hal. 83 dalam program kitab digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09., hal. 98-100.

meninggalkan jihad akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Swt. Patuhlah kalian kepadaku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Jika aku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mematuhi. Kini marilah kita menunaikan salat. Semoga Allah Swt melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.” Ada 7 poin yang dapat diambil dari inti pidato khalifah Abu Bakar ra ini, di antaranya:¹⁵

- a. Sifat rendah hati
- b. Sifat terbuka untuk dikritik
- c. Sifat jujur dan memegang amanah.¹⁶
- d. Sifat berlaku adil.¹⁷
- e. Komitmen dalam perjuangan.
- f. Bersikap demokratis.
- g. Berbakti dan mengabdikan kepada Allah.

Al-Gazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid al-Ghazali atau Imam Ghazali (450H/1058M-505H/1111M). Bukunya yang paling terkenal adalah *Ihya Ulum al-Din* (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama). Kriteria yang dikemukakan al-Ghazali sebagai syarat seorang imam, khalifah atau kepala negara adalah: (1) Dewasa atau aqil baligh; (2) Otak yang sehat; (3) Merdeka dan bukan budak; (4) Laki-laki; (5) Keturunan Quraisy; (6) Pendengaran dan penglihatan yang sehat; (7) Kekuasaan yang nyata; (8) Hidayah; (9) Ilmu pengetahuan; dan (10) Kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (*wara'*).

Ibn Taimiyah¹⁸ berpendapat bahwa; Orang yang pantas menjabat kepala negara adalah

- a) Memiliki kualifikasi kekuatan
- b) Memiliki sifat *al-amanah*

Kedua syarat tersebut berdasarkan Al-Qur'an surat (28) Al-qashash ayat 26 :¹⁹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَجِرُّهُ ۖ إِن خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَارَةِ الْقَوَى الْأَمِينِ

¹⁵Mukhlis Zamzami Can, “Profil Pemimpin Islam”, dalam www.eramuslim.com.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hal. 59.

¹⁷ Aristoteles, *Nicomachean Ethics, Sebuah “Kitab Suci” Etika*, terj. Embun Kenyowati, (Bandung: Mizan, 2004), hal. 113.

¹⁸Taimiyah, *Al-Siyasah Syar'iyah*, hlm. 15

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

2. Syi'ah

Persyaratan seorang *Imam* (Pemimpin) menurut *Syi'ah* adalah

- 1) Harus *ma'shum* (terpelihara) dari perbuatan salah, lupa dan maksiat
- 2) Seorang *Imam* boleh membuat hal yang luar biasa dari adat kebiasaan yang mereka sebut mukjizat untuk mengukuhkan keimanannya sebagaimana mukjizat yang terjadi pada Nabi-nabi Allah.
- 3) Seorang *Imam* harus memiliki ilmu yang meliputi setiap sesuatu yang berhubungan dengan *syari'at*, pengetahuan yang luas itu bukan melalui proses belajar dan *ijtihad* tetapi merupakan ilmu *laduni*.
- 4) *Imam* adalah pembela agama dan pemelihara kemurnian serta kelestarian agar terhindar dari penyelewengan.¹⁹

Sebagian para rasionalisme lainnya menganggap bahwa hadits tentang tidak beruntung apabila kepemimpinan diserahkan kepada perempuan kontradiksi dengan Al-Qur'an yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman bersama Ratu Balqis seperti diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. (QS. An-Naml: 23).

Berikut ini kita kemukakan beberapa ayat dan riwayat yang berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Muhammad al-Gha-zali,²⁰ sebagai berikut:

¹⁹ Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyat fi al-Siyasat wa al-Aqidat*, Bairut : Dar al-fikr al-arabi, t.t hlm. 56-58

²⁰ Muhammad al-Ghazali adalah intelektual muslim terkemuka abad ke-20. Ia berjasa besar dalam gerakan "Islamisasi Ilmu" yang merebak dewasa ini. Karenanya ia diangkat menjadi anggota penasihat pada *International Institute of Islamic Thought* (IIIT), yang bemarkas di Washington Amerika Serikat. Al-Ghazali lahir di Mesir 1917 M dan meninggal pada tanggal 8 Maret 1996, di tengah lawatannya ke Saudi Arabia. Lihat majalah *Umat*, Jakarta: Edisi April 1996, hlm. 76-77.

“Dan Tuhan mereka mendengar permohonan mereka dan ia berkata: Sesungguhnya Aku tidak pernah menyalah-nyalakan orang yang beriman di antara kamu sekalian, baik laki-laki maupun perempuan” (QS., Ali Imran: 195).

Menurut al-Ghazali,²¹ yang mengutip pendapat Imam At-Tabari, bahwa latar belakang turunnya ayat ini adalah Ummu Salamah, istri Nabi yang pada suatu hari bertanya kepada Rasul: “Mengapa kaum laki-laki yang hijrah disebut (dalam Alqur’an) sedangkan perempuan tidak?” Karena dalam kenyataannya, Ummu Salamah adalah di antara perempuan yang telah dua kali hijrah untuk mendukung perjuangan Islam. Yang pertama dari Makkah ke Ethiopia dan selanjutnya dari Makkah ke Madinah. Allah mendengar pertanyaan Ummu Salamah dan turunlah wahyu untuk menjelaskan semangat agama baru ini: ‘Dan Tuhan mereka mendengar permohonan mereka dan Ia berkata: Sesungguhnya Aku tak pernah menyalah-nyalakan orang yang beriman di antara kamu sekalian, baik laki-laki maupun perempuan’” (QS. Ali Imran, 3: 195).

Ummu Salamah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang hebat itu dan kita, berabad-abad kemudian dapat menikmati sebuah kepastian, bahwa agama baru itu (Islam) memberikan kesetaraan yang mutlak antara laki-laki dan perempuan. Hijrah sebagai sebuah tindakan politik mengandung pesan yang amat jelas bahwa perempuan harus dilibatkan dalam urusan kemasyarakatan. Ini adalah tanggung jawab kaum perempuan untuk memperjuangkan perbaikan masyarakat dan mereka akan mendapat balasan dari apa yang mereka kerjakan.

Karena itu kaum muslimin khususnya kaum perempuan, banyak berhutang budi kepada Ummu Salamah untuk pertanyaan yang tak hentinya akan kejelasan status yang diberikan kepada perempuan dalam Al-qur’an. Ketika Nabi menikahinya, ia telah menjadi perempuan yang matang, seorang janda dengan beberapa anak. Ummu Salamah telah mengalami kehidupan yang keras sebagai muslim yang berhijrah (muhajir).

Ummu Salamah bersama suami pertamanya masuk Islam pada saat awal kemunculan Islam di Makkah. Ia merupakan salah seorang di antara mereka yang berhijrah ke Ethiopia pada peristiwa hijrah yang pertama ketika perlawanan terhadap Islam sangat keras. Ia dan suaminya kemudian kembali ke Makkah ketika situasi telah tenang kembali dan melakukan hijrah selanjutnya dari Makkah ke Madinah. Selama periode panjang hijrah itu ia me-

²¹Fatima Mernisi dan Riffat Hasan, *Kesetaraan di Hadapan Allah*, Yogyakarta: LSPPA, 1996, hlm. 228.

lahirkan 4 orang anak. Dan setelah suaminya meninggal, Nabi melamarnya dan ia menerimanya.

Oleh karena itu, bukanlah sesuatu yang mengejutkan jika Ummu Salamah terus mengajukan pertanyaan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan berbagai perubahan yang ingin diwujudkan oleh Islam bagi kehidupan perempuan. Hal ini penting untuknya diketahui sejauh mana dan dengan cara apa Islam membuat jarak dengan praktik-praktik di zaman Jahiliyah di mana kekerasan dan perbudakan harus diterima sebagai nasib yang harus dialami oleh kaum perempuan.

Karena alasan ini ia kemudian mengajukan pertanyaan tentang status perempuan yang berhijrah dari Makkah ke Madinah yang diyakininya sebagai bentuk tindakan mendukung perjuangan untuk Islam.

Atas pertanyaan tentang status perempuan, di mana di zaman Jahiliyah itu merupakan subordinasi kaum laki-laki, maka turunlah pula ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan substansial antara laki-laki dan perempuan, seperti yang terungkap ketika turun ayat 35 surat al-Ahzab.²²

Riffat Hasan, menjelaskan bahwa demikian kesetaraan itu dinyatakan dengan jelas dalam berbagai istilah yang tak diragukan dalam Alqur'an itu sendiri. Jadi jika kita mengklaim bahwa kesetaraan itu merupakan warisan Barat atau meminjam ide-ide dari kebudayaan asing, maka kita sesungguhnya bodoh. Karena Alqur'an sejak kemunculannya telah dahulu pernah menyuarakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Bahkan tidak hanya pertanyaan-pertanyaan tentang kesetaraan yang muncul ketika Nabi di Madinah, tetapi lebih dari itu, kaum perempuan menerima pula jawaban positif terhadap keingintahuan mereka. Wahyu Ilahi menjamin mereka bahwa kekerasan dan penghambaan atas perempuan di zaman Jahiliyah itu benar-benar telah berakhir.

Era baru Islam berarti status baru bagi perempuan. Ayat-ayat tentang Ratu Saba meninggikan aspirasi perempuan dengan memberi mereka model peranan perempuan sebagai kepala negara. Dan banyak perempuan dalam sejarah muslim telah membuktikan kesuksesan mereka juga.

²² *Ibid*, hlm 231. Uraian lebih lanjut, lihat dalam uraian bagian ketiga buku ini.

Lebih lanjut, Riffat Hasan²³ menyatakan bahwa dengan adanya realitas itu kita perempuan muslim harus menyongsong ke depan dengan serius dan bercita-cita tinggi. Dunia milik kita, kebesaran dan kejayaan adalah masa depan sekaligus masa lalu kita dengan menuntut kembali akar warisan Islam, baik yang religius maupun yang historis. Atas dasar kesadaran keberagaman Ummu Salamah, istri Nabi yang mengajukan pertanyaan yang mendasar, bahwa perempuan dan laki-laki berstatus sama dalam Islam dan bahwa mereka rekan setara dalam hak-hak istimewa. Oleh karena itu tidak ada yang lebih islami dari pada seorang perempuan yang menuntut hak-haknya seperti Ummu Salamah, untuk kesetaraan dan kebebasan dari penghambaan dan penghinaan. Kewibawaan dan harga diri perempuan mungkin sumbangan paling bermakna di antara sumbangan Islam kepada hak-hak asasi manusia dan kepada peradaban.

Dan sepanjang hubungannya dengan sejarah, banyak nenek moyang perempuan kita yang mengemban tanggungjawab politik secara serius dan mendapatkan jabatan tertinggi sebagai kepala negara. Contoh yang jelas adalah Ratu Saba dan Alqur'an telah menunjukkan jalan itu kepada kita. Dan hal itu senada dengan tuntutan zaman dewasa ini.

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah (Q.S. 49: 13). Sebagai orang yang beriman, tentu umat Islam meyakini kebenaran pernyataan ayat ini, tapi kita perlu penjelasan lebih lanjut persamaan yang bagaimana sebenarnya yang dikehendaki oleh ajaran Islam tersebut, dalam hal ini terutama tentang persamaan antara pria dan wanita. Untuk mengetahui jawabannya tentu saja harus dilakukan penelitian terhadap ayat-ayat yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an.

Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan gender khususnya yang berkaitan dengan upaya perubahan pranata sosial yang adil -- dimana pria dan wanita dipandang sebagai diciptakan sama, berpotensi sama dan mempunyai hak sama atas sumber daya ekonomi, politik dan budaya --telah menjadi isu penting, terutama sejak awal abad ini. Tuntutan perubahan ini umumnya disuarakan oleh kaum perempuan yang sejak berabad-abad *de facto* tersubordinasi di bawah sistem sosial berdasarkan ideologi patriarki.

²³ *Ibid*, hlm. 232.

Cara pandang masyarakat yang didominasi laki-laki dan nilai-nilai sosial yang didasarkan pada ideologi patriarki tak terhindarkan telah masuk mewarnai atau bahkan menentukan penafsiran teks-teks keagamaan. Dalam banyak hal, kecenderungan ini telah mengaburkan pesan wahyu tentang masyarakat yang secara gender egaliter dan adil.

Langkah awal yang penting untuk dipahami dalam pembahasan ini adalah perbedaan antara gender dan seks, karena hal ini sangat diperlukan berkaitan dengan masalah ketidakadilan sosial dalam masyarakat secara lebih luas. Kata seks (jenis kelamin) merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Ini secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau *kodrat*.

Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan ini terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Perbedaan gender ini sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang jadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender ini termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi atau proses pemisahan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Persoalan ketidakadilan itu pula yang kemudian menjadi alasan munculnya tuntutan kesetaraan dari pihak perempuan dengan laki-laki pada periode paling awal, yakni ketika masa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW.

Adalah Ummu Salamah, salah seorang istri Rasul yang dikenal sebagai shahabat yang sangat lembut dan penuh keramahan, tiba-tiba meledak-ledak pikirannya ketika ia dengan sekian lama bergaul dengan Sang Penerima Wahyu, yang tak lain adalah suaminya sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW, saat menyaksikan tak satupun ayat yang berbicara secara tekstual menyetarakan kaum wanita dengan kaum laki-laki, baik dalam konteks perintah maupun pelarangan untuk melakukan sesuatu.

Dalam pengetahuan Ummu Salamah, wa-nita tak pernah disebut secara jelas di samping laki-laki, padahal realitas hidup tidak demikian. Ini tentu diskriminatif, dan faktanya ayat-ayat tidak menggunakan lafadh yang menunjukkan pada kaum wanita, padahal pembicaraan itu juga umumnya menyangkut keterlibatan kaum wanita. Kecuali yang betul-betul suatu ayat khusus ditujukan kepada laki-laki. Semua kandungan Alqur'an yang berupa perintah dan larangan ditujukan kepada laki-laki dan wanita. Dalam kedudukannya sebagai hamba Allah, wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki terutama dalam keharusan beribadah. (Q.S., al-Taubat, 9: 71). Itu sebab-nya, untuk memenuhi rasa penasarannya, Ummu Salamah – seperti diriwayatkan oleh Ah-mad dari Abdurrahman Ibn Syaibah, bertanya sekaligus protes kepada Rasul: *“Mengapa kami kaum wanita tidak pernah disebut-sebut dalam Alqur'an sebagaimana kaum laki-laki?”*. Pertanyaan yang mewakili aspirasi kaum wanita ini ternyata didengar oleh Allah. Sehingga kemudian Ummu Salamah berkata: *“Saya pada suatu hari tidak dikejutkan melainkan dengan seruan Rasulullah di atas mimbar, waktu itu saya sedang menyisir rambut, maka saya melipat rambut saya dan keluar menuju salah satu kamar dari kamar-kamar istri Rasul. Di sana dekat tikar daun kurma saya mendengar Rasul di atas mimbar sedang membaca ayat 35 dari surat al-Ahzab: Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, laki-laki yang taat dan wanita yang taat, laki-laki yang benar dan wanita yang benar, laki-laki yang sabar dan wanita yang sabar, laki-laki yang khusyu dan wanita yang khusyu, laki-laki yang bersidkah dan wanita yang bersidkah, laki-laki yang berpuasa dan wanita yang berpuasa, laki-laki yang menjaga kehormatannya dan wanita yang menjaga kehormatannya, laki-laki yang banyak mengingat Allah dan wanita yang mengingatNya, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”*.

Dalam ayat di atas kesamaan dan kese-derajatan kaum wanita dan laki-laki sama. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah mene-gaskan memanggil laki-laki dan wanita un-tuk memenuhi tugas *amar ma'ruf* dan *nahyi munkar* dalam rangka beribadah kepada-Nya. Demikian pula masalah pahala dan siksa antara laki-laki dan wanita berkedudukan sama sederajat, dan dinilai dari ketaqwaannya. (Q.S. al-Nahl, 16: 97).

BAB IV

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Islam dan hak-hak Perempuan

Menurut pandangan Islam, bahwa perempuan berhungan dengan kepemimpinan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih yang walaupun terdapat berdedaan pendapat dalam masalah ini

B. Kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah terdapat beberapa pendapat, yaitu:

1. Ulama siyasah syar'iyah sunni klasik sebagian mensyaratkan harus laki-laki seperti Imam al-Ghazali, dan sebagian lagi tidak mensyaratkan harus laki-laki seperti al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah
2. Di masa sekarang ini, masi terdapat perbedaan pendapat terkait dengan Kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah, ada yang tetap tidak membolehkan dengan alasan seperti yang digunakan oleh fuqaha dan ada juga yang membolehnya serta sebagian lagi memperjuangan kebolehan perempuan menjadi pemimpin publik dengan kajian gendernya.
3. Perjuangan supaya perempuan setara dengan laki-laki dalam persoalan kepemimpinan sampai saat sekarang sedang diperjuangkan oleh para aktifis-aktifis perempuan baik di Negara-negara Islam maupun Negara-negara barat

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayub al-Dimsyqi, *I'lam al-Muaqiin*, Bairut : Dar al-Jil, 1973 M
- Abdurahman Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad al-Suyuti, *Tafsir Ijithad*, Iskandariyah : Dar al-Dawah, 1403 H
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayub al-Dimsyqi, *I'lam al-Muaqiin*, Bairut : Dar al-Jil, 1973 M
- Abu al-Hasan Ibn Ali Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam lil Amidi*, Bairut: Dar al-Kitab al Arabi, 1404 H
- Abdul Wahab Khalaf, *Siyasah al-Syar'iyah*, Al-Qahirah: Dar al-Anshar,t.t
- Ahmad Ibn Hambal Abu Abdillah Al-Syaibani ,*Musnad Ahmad Ibn Hambal*, Mesir : Muassasah Qurtubah
- Ahmad Ibn Husain Ibn Ali IbnMusa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, (Makkah al-Mukaramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994
- Ahmad Ibn Syueb Abu Abdurahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasai*, (Halb : Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, (Beirut: Darul Ma'rifah, tt).
- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyyah al-Harani, *as-Siyasah asy-Syar'iyyah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt).
- Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasa'i, *Musnad an-Nasa'i al-Kubra*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1991)
- Al-Baz, Shahida. 1995. *Al-Quyud Al-Iqtisadiya wa-l- ijtima'iya wa athariha 'ala Al-Mar'* (Batasan-batasan Ekonomi dan Sosial dan Dampak terhadap Perempuan). Cairo: Al Jeel Center
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*, *Sebuah "Kitab Suci" Etika*, terj. Embun Kenyowati, (Bandung: Mizan, 2004).
- Ahmad bin Muhammad As-Shaawi 'Bulghatus Salik liaqrabil Masaalik
- Ani Soetjipto, *Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Gender Politik*, Jakarta 23 Nopember 1999
- Esiklopedi Hukum Islam Jilid I*, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2001

- Esiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2001
- Fatima Mernisi dan Riffat Hasan, *Keseta-raan di Hadapan Allah*, Yogyakarta: LSPPA, 1996
- Fazlurrahman, *Tema Pokok Alqur'an*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1983
- Gadis Arivia, "Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah Bukan Sekedar Hiasan," IDEA, dan YJP, 1999
- Ibrahim, Saad Eddin. 1996. *Al-Mar'a Al-Misriya wa-l-Hayat Al-Ama* (Perempuan Mesir dan Kehidupan Publik). Cairo: Ibn Khaldun Center for Development Studies
- Ibnu Hazm 'Al- Fashlu fi al-Milal wa al- Ahwa' wa an-Nihal' Dar al-Ma'rifah, 1384 H
- Ibn Qayim al-Jauziyah, *Al-Thuruqu al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Al-Qairah: Muassasat al-Arabiyyat li al-Thad'I wa al-nasyr, 1961
- Ibnu Qudamah 'Al-Mughni' Birut : Dar al-Ma'rifah, 1380 H
- Ibnu Hibban. *Sirah Ibnu Hibban*. Bairut: Dar al-Amaliyah, 1415 H
- Ibnu Hammam 'Syarh Fathul Qadiir 'Dar al-Ma'rifah, 1380 H
- Ibn Hajar al-Astqalani, *Fath al-Bari fi Sahih al-Bukhari*, Birut : Dar al-Ma'rifah, 1379 H
- Ibn Khaldun, *Al-Ta'arif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Syarqan*, Cairo : Lajnah al-Ta'lif al-Tarjamah wa al-Nasur, 1951
- Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 2001
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, Jakarta: Matahari Masa, 1976
- Hakim Jabid Iqbal, "Konsep Negara Islam" dalam Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1993
- Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Malcolm Hardy & Steve Heyes, *Pengantar Psikologi*, (terj. Soenardji dari *Beginning Psychology*), Ja-karta: Erlangga, 1988
- Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tarmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Daru Ihya al-Turats al-Arabi, t.t
- Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut : Dar Ibn Katsir,
- Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abdul Qodir al-Razi, *Mukhtar al-Shiyakh*, (Beirut :Maktabah Libanon, 1995), juz 1, hlm. 48. Muhammad Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Bairut : Dar al-Fikr, t.t
- Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Butami, *Shahih Ibn Hibban*, (Bairut: Muasasah al-Risalah, 1993
- Muhammad Al-Ghazzali "As-Sunnah Nabawiyyah" Dar As-Syuruq, 1409 H

Mukhlis Zamzami Can, "Profil Pemimpin Islam", dalam www.eramuslim.com

Mursyidah Thahir, (Ed.): *Jurnal Pe-mikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: Muslimat NU dan Logos, 2000

Maktabah Syamilah. versi 2.09. (Program Komputer: Perpustakaan Digital)

Miriam Budiardjo (komnas HAM) bekerjasama dengan Neil Kemp (the British Council), "Lembar Fakta 02: Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia," terjemahan dari *Fact Sheet 02 UN Centre for Human Right*, Jakarta: Komnas HAM, 1998

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982).

Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, (Bandung: Mizan, 1993).

Syairazi 'Takmilah Al-Majmu' syarhul Muhadzaab; Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1380 H

K.J. Veeger, *Realitas Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1990

Tahir Mahmood (ed.), *Human Rights in Islamic Law*, New Delhi: Institute of Objective Studies, Cet.1 1993.

Quraisy Shihab, *Wawasan Alqur'an*, Bandung: Mizan, 1996

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung : Rosda karya, 1989

Wahbah az-Zuhaili 'Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1380 H

Parsudi Suparman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Program Pascasarjana UI, 1984

Suaib Didu, *HAM Perspektif Hukum Islam & Hukum Internasional*, Jakarta: Institut HAM, 2006

Qodir CA, *Scientifik Metode*, terj. Bosco Carvalo, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995

Yusuf al-Qardhawi 'Min Fiqhi ad-Daulah, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1380 H

Yuliani Lipito, Artikel: "Gerakan Perempuan dan Evolusi Teori Pembangunan," dalam *Republika*, 27 Januari 1995

Veeger, K.J. *Realitas Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 1990).

www. Teori Keragaman. com, [http : //. Wikipedia. Org/wiki](http://.Wikipedia.Org/wiki)

[www. kompas.co.id](http://www.kompas.co.id).

www.al-islam.com

www.eramuslim.com

www.islam-lib.com

[http : //. Wikipedia. Org/wiki](http://.Wikipedia.Org/wiki)

<http://www.qirtin.com/kaidah-kaidah-kontekstual/#ixzz1gQwCrpvL>

: *<http://www.erasmusli m.com/berita/ dunia/fatwa->*

http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS_Egypt_Lebanon_Jordan.pdf

<http://www.uinjkt.ac.id/index.php/component/content/article/1-headline/1809-iran-junjung-tinggi-martabat-perempuan>

<http://www.cgnews.org/article.php?id>

**EKSISTENSI DAN PERANAN PERADILAN AGAMA
KOTA CIREBON
DALAM PENERAPAN HUKUM PERDATA ISLAM
DI PERADILAN TINGKAT PERTAMA**

EXECUTIVE SUMMARY PENELITIAN



Oleh

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIDN. 20040116402
NIP.196401041992031004

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2015**

ABSTRAK

Peradilan Agama di Indonesia berhadapan dengan teori hukum ketatanegaraan yang digunakan di Indonesia oleh karena itu dipertanyakan tentang eksistensi dan peranannya sebagai lembaga penegak hukum perdata Islam, disamping itu dalam sejarah Peradilan Agama eksistensi dan peranannya mengalami fluktuasi, Peradilan Agama Kota Cirebon sebagai lembaga penegak hukum perdata Islam di tingkat pertama apakah masi eksis dan mempunyai peranan sebagai lembaga penegak hukum perdata Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sejarah dan profil Pengadilan Agama Kota Cirebon ? Bagaimana eksistensi Peradilan Agama Kota Cirebon dalam penerapan hukum perdata Islam sejak berdirinya sampai sekarang ? Bagaimana peranan Peradilan Agama Kota Cirebon dalam penerapan hukum perdata Islam sejak berdirinya sampai sekarang ? adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Sejarah dan profil Pengadilan Agama Kota Cirebon, untuk mengetahui eksistensi Peradilan Agama Kota Cirebon dalam penerapan hukum perdata Islam sejak berdirinya sampai sekarang, untuk mengetahui peranan Peradilan Agama Kota Cirebon dalam penerapan hukum perdata Islam sejak berdirinya sampai sekarang

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Metode yang gunakan oleh penulis adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa masa sekarang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penulis dapat mengetahui gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta gejala yang sudah diselidiki

Sejarah dan profil Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam perspektif teori hukum ketatanegaraan dan teori eksistensi, eksistensi Peradilan Agama Mengikuti teori hukum ketatanegaraan yang digunakan serta mengikuti situasi politik hukum, karena peradilan agama selalu berhubungan dan berhadapan dengan negara atau peradilan agama vis to vis teori hukum ketatanegaraan. dalam penerapan Hukum Islam bahwa Pengadilan Agama Kota Cirebon telah eksis sejak Islam ada di Indonesia atau sejak Agama Islam masuk ke Bumi Nusantara ini yaitu sejak abad ke tujuh Masehi atau bertepatan dengan abad ke satu Hijriyah, namun dalam peranannya mengalami fluktuasi disebabkan karena dipengaruhi oleh politik hukum penguasa.

Peneliti : H. Kosim

Email ; kosimrusdi @gmail.com

Kata Kunci : eksistensi, peranan, pengadilan agama

ABSTRACT

Religious Courts in Indonesia dealing with the theory of constitutional law that is used in Indonesia therefore be questioned about the existence and role as law enforcement agencies of civil Islam, besides the history of the Religious Courts existence and role fluctuated, the Religious Courts Cirebon as the law enforcement agencies of civil Islam in the first instance whether masi exist and have a role as an Islamic civil law enforcement agencies.

Formulation of the problem in this research is how the history and profile religious court Cirebon? How the existence of the Religious Courts Cirebon in the application of civil law of Islam since its inception until now? How is the role of Religious Court Cirebon in the application of civil law of Islam since its inception until now? as for the purpose of this research is to know the history and profile Cirebon Religious Court, to determine the existence of the Religious Courts Cirebon in the application of civil law of Islam since its inception until now, to determine the role of Religious Court Cirebon in the application of civil law of Islam since its inception until now

This research is a qualitative research method used by writer is descriptive method. Descriptive method is a method of research that examines the status of a group of people, an object, a condition, a thought or an event today. The goal of this research is the writer can find a picture of systematic, factual, and accurate about the facts of the symptoms that have been investigated

History and profile religious court Cirebon in the perspective of the theory of constitutional law and theory of existence, the existence of the Religious Courts Following the theory of constitutional law used and menngukuti political situation of law, because the religious courts are always in touch and dealing with the state or religious courts vis to vis theory of constitutional law. in the application of Islamic law that Islamic Court Cirebon has existed since Islam in Indonesia or since Islam entered the archipelago is that since the seventh century AD or coincide with the century of the Hegira, but the role has fluctuated due influenced by the politics of law ruler

Researcher: H. Kosin

email; kosimrusdi @ gmail.com

Keywords: eksisistensi, roles, religious courts

BAB I

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pelaksanaan hukum Islam merupakan kewajiban masing-masing individu orang Islam. Namun, dalam keadaan tertentu jika terjadi persengketaan maka untuk mencari keadilan, pelaksanaan hukum Islam tersebut memerlukan campur tangan pihak yang memiliki otoritas atau penguasa. Penguasa dalam hal ini disebut *al-hakim*, yaitu pelaksana hukum. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pelaksanaan hukum Islam di mulai dengan jabatan hakim atau qadhi di pengadilan. Keberadaan lembaga penegak hukum tersebut diperlukan oleh umat Islam untuk penegakkan dan pengamalan hukum Islam (Zaini Ahmad Noeh: 1996)

Salah satu elemen pranata sosial di Indonesia yang bertugas melaksanakan dan menegakkan keadilan (Keadilan dalam bahasa *Salaf* adalah sinonim *al-mizan* yang berarti keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam al-Quran kadang-kadang sama pula dengan *al-qist*, *al-mizan* yang berarti keadilan. Dalam al-Quran dijumpai dalam surat ke-42 *al-Syura* ayat 17 dan surat ke-57 *al- Hadid* ayat 25. Term “keadilan” pada umumnya berkonotasi penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Keadilan hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah *tauhid* meliputi keadilan dalam berbagai hubungan; hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait (Yahya S. Praja; 1993) adalah tugas Peradilan Agama yang merupakan salah satu institusi yang sangat urgen dalam tata kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia.(Rahmat Syafi.i : 1999) Secara *filosofis*, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakkan hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat. Secara *yuridis*, ia merupakan bagian dari supra struktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Secara *historis*, ia merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Dan secara *sosiologis*, ia lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat majemuk

Sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia, Peradilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata bagi umat Islam yang diajukan kepadanya.(Pasal 49 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989.)

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama harus mengindahkan dua aturan hukum sesuai dengan posisinya sebagai Peradilan Negara dan Peradilan Islam.(Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Negara tertuang dalam Pasal 1, 2, 3 dan 10 Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sebagai Peradilan Islam dikukuhkan dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989)

Kedua aturan hukum tersebut adalah hukum negara dan hukum Islam yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk hukum tertulis. Hal inilah yang mendasari adanya aturan khusus (*lex specialis*) beracara pada Peradilan Agama. Namun secara realita, belum semua aturan beracara menurut hukum Islam (*fiqh*) itu ditransformasikan ke dalam hukum tertulis, yakni dalam bentuk peraturan perundang-undangan, misalnya ketentuan hukum acara Peradilan Agama sekitar eksekusi putusan. Selama ini aturan hukum acara tentang eksekusi putusan di lingkungan Peradilan Agama didominasi oleh HIR. dan R.Bg yang merupakan sumber Hukum Acara Perdata pada Pengadilan dalam di lingkungan Peradilan Umum. Hal tersebut diberi peluang oleh Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Pasal 54 UU yang menegaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Mewujudkan keadilan merupakan tujuan utama lembaga peradilan yang diproyeksikan dalam bentuk putusan. Putusan sebagai produk pengadilan, dari segi pelaksanaannya dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk; *pertama*, yang dapat dieksekusi (*executable*), dan *kedua*, yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*). (Term eksekusi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu *execution* artinya pelaksanaan, dijalankan secara paksa. Adapun secara terminologi terjadi perbedaan rumusan di kalangan ahli hukum. Di antara ahli hukum ada yang merumuskan bahwa eksekusi bagian yang tak terpisahkan dari setiap putusan. artinya, semua putusan mesti dapat dilaksanakan, karena tanpa pelaksanaan putusan menjadi hampa (tidak bermakna). Sementara yang lain merumuskan eksekusi dengan pelaksanaan putusan secara paksa. Adapun pelaksanaan putusan secara sukarela tidak dinamakan eksekusi) Kedua bentuk putusan pengadilan tersebut mesti dapat dilaksanakan, karena seadil apa pun sebuah putusan, apabila tidak dapat dilaksanakan, maka putusan tersebut akan hampa (tidak bermakna). Inilah yang pernah diperingatkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khathab kepada para

qadhi (hakim) pada masanya agar setiap putusan yang dibuat mesti dapat dilaksanakan (Ibn Qayyim al-Jauziyyah : 1983)

Eksistensi dan peranan Peradilan Agama bukan tidak mengandung persoalan karena dalam sejarah keberadaan Peradilan Agama di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang waktu yang panjang sejak Islam menjadi kekuatan politik di Indonesia. Sejalan dengan dinamika hukum yang semakin kompleks, peradilan agama berusaha tampil sebagai suatu institusi yang menjadi pilar bagi suksesnya penegakan supremasi hukum. Karena itu, eksistensi peradilan agama perlu diperkuat dengan aturan normatif yang memberi otoritas yang luas (yurisdiksi) kepada peradilan agama (Kosim Rusdi: 2011)

Pada Desember 2006, pemerintah menetapkan amandemen terhadap UU No. 7 tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Penetapan Undang-undang baru ini membawa implikasi yang signifikan bagi peradilan agama, baik dalam konteks institusional maupun dalam konteks kewenangan mengadili (yurisdiksi).

Dalam konteks *institusional*, peradilan agama memiliki kedudukan yang sama dengan peradilan umum lainnya dalam tata hukum Indonesia. Lebih lanjut, substansi dari UU No. 3 Tahun 2006 salah satunya menetapkan kebijakan satu atap dalam institusi kehakiman. Peradilan agama yang sebelumnya masih dalam naungan Departemen Agama, setelah amandemen maka peradilan agama berada di bawah otoritas atau naungan Mahkamah Agung. Hal ini membawa keuntungan yang sangat signifikan bagi peradilan agama itu sendiri. *Pertama*, peradilan agama mendapatkan pengakuan yang luas dari lembaga-lembaga atau institusi hukum lainnya. Sebagai yang kita ketahui, sebelum kebijakan satu atap ini, peradilan agama cenderung dipandang sebelah mata sehingga menurunkan reputasinya sebagai lembaga pengadil. Dapat dimaklumi, sebab saat itu selain belum dibawah langsung oleh Mahkamah Agung, partisipasi peradilan agama dalam lalu lintas hukum kurang komprehensif. *Kedua*, peradilan agama setelah keluarnya kebijakan satu atap ini mulai mendapatkan prioritas yang seimbang dengan peradilan umum lainnya, seperti peradilan negeri. Peningkatan prioritas itu antara lain ditandai dengan bertambahnya hakim agung yang direkrut dari hakim-hakim tinggi yang berlatar belakang hakim peradilan agama. Adalah sesuatu yang cukup menggembirakan ketika hakim-hakim agama (hakim tinggi) diberi akses yang luas sebagaimana yang berlaku bagi hakim-hakim negeri (hakim tinggi) untuk menjadi hakim agung, sebab dengan hal ini partisipasi peradilan agama secara tidak langsung dalam upaya penegakan supremasi hukum menjadi lebih signifikan dan sebagai salah satu wahana bagi aktualisasi visi luhur lembaga peradilan agama (pengayoman).

Dalam konteks kewenangan mengadili, yurisdiksi peradilan agama mengalami perluasan yang cukup signifikan. Peradilan agama tidak lagi hanya menangani masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, namun lebih dari itu peradilan agama diberikan wewenang yang lebih krusial. Pada pasal 49 point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan UU No. 3 tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Eksistensialisme

Istilah eksistensi berasal dari kata *existere* (eks: luar, sister =ada atau berada), dengan demikian, eksistensi memiliki arti sebagai “sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya” atau “sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri”. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak ada sesuatupun yang mempunyai ciri atau karakter *existere* selain manusia. Hanya manusia yang bereksistensi. Hanya manusia yang sanggup keluar dari dirinya, melampaui keterbatasan biologis dan lingkungan fisiknya, berusaha untuk tidak terkungkung dari segala keterbatasan yang dimilikinya, contohnya saja pada orang yang tidak memiliki kaki, dia mampu keluar dari dirinya dan mampu berbaur dengan orang lain tanpa memperdulikan kekurangan yang ada pada dirinya, dia mampu berkreasi tanpa bantuan orang lain, dan mampu menghasilkan uang dari apa yang telah mereka perbuat. Oleh sebab itu, para eksistensialis menyebut manusia sebagai suatu proses, “menjadi”, gerak yang aktif dan dinamis. (filsafat.kompasiana.com/...-teori-eksistensialisme..)

Eksistensialisme adalah aliran [filsafat](#) yang pahamnya berpusat pada [manusia individu](#) yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya bukannya tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi seorang eksistensialis sadar bahwa kebenaran bersifat relatif, dan karenanya masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar.

B. Teori peranan

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Levinson dalam Soekanto mengatakan : peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (*Soerjono Soekanto* : 2009)

Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Wirutomo mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. (*Cohen Bruce* : tanpa tahun)

C. Teori existensi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia

Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia – hukum positif -. Menurut teori ini bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah :

- 1) Ada, yang dalam arti hukum Islam berada dalam tata hukum nasional sebagai bagian yang terintegral darinya.
- 2) Ada, dalam arti lain yaitu kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional,
- 3) Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia,

4) Ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur penting hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan teori ini maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama atau unsur utama hukum nasional.(<http://himmah679.blogspot.com/2010/01/teori-teori-eksistensi-hukum-islam.html>)

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Metode

Dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut.

Pilihan terhadap tradisi mana yang akan ditempuh peneliti sangat ditentukan oleh tujuan dan jenis data yang akan ditelitinya. Oleh karena itu pemahaman terhadap paradigma ilmu pengetahuan sangatlah perlu dilakukan oleh para peneliti. Bagi kegiatan penelitian, paradigma tersebut berkedudukan sebagai landasan berpijak atau fondasi dalam melakukan proses penelitian selengkapya

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber datanya terdiri dari :

1. Sumber data primer, yaitu : Pengadilan Agama Kota Cirebon , terdiri dari Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Pansek, Dokumen tentang profil , buku yang membahas tentang teori eksistensi, teori peranan, teori peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum di Indonesia, buku tentang pengadilan kota Cirebon, Portal Pengadilan Kota Cirebon
2. Sumber data skunder, yaitu : Data pendukung tentang eksistensi dan peranan Pengadilan Agama kota Cirebon, yaitu Masyarakat Pengguna Pengadilan Agama kota Cirebon, buku.buku pendukung seperti sejarah pengadilan Agama di Indonesia.

C. Jumlah sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini, tidak banyak karena penelitiannya adalah penelitian kualitatif, sampelnya sebagai informan yaitu Ketua Pengadilan Agama Kota Cirebon, Hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon, Pansek Pengadilan Agama Kota Cirebon dan portal website Pengadilan Agama Kota Cirebon

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

1. Observasi, yaitu mengamati secara langsung ke Pengadilan Agama Kota Cirebon
2. Wawancara, yaitu
 - a. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Cirebon
 - b. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon

- c. Wawancara dengan Pansek Pengadilan Agama Kota Cirebon
- 3. Studi Dokumentasi, yaitu Profil Pengadilan Agama Kota Cirebon yang ada di Portal website Pengadilan Agama Kota Cirebon

D. Desain Penelitian

Dalam Penelitian ini, desain penelitiannya adalah

1. Menentukan masalah penelitian
2. Menentukan judul dan tempat penelitian
3. Membuat proposal penelitian
4. Melakukan Penelitian
5. Mengecek Data Hasil Penelitian
6. Menganalisis hasil penelitian
7. Menyusul Laporan akhir penelitian
8. Seminar hasil penelitian

E. Keabsahan Data

Kebasahan data dalam penelitian kualitatif ini, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data [penelitian kualitatif](#), yaitu: nilai subyektivitas, metode pengumpulan dan sumber data penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu: kredibilitas, transferabilitas dan konfirmabilitas

1. Kredibilitas

Apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Beberapa kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail, triangulasi, per debriefing, analisis kasus negatif, membandingkan dengan hasil penelitian lain, dan member check. Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, yaitu:

- a. Memperpanjang masa pengamatan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.
- b. Pengamatan yang terus menerus, untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

- c. Triangulasi, pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
- d. Peer debriefing (membicarakannya dengan orang lain) yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.
- e. Mengadakan member check yaitu dengan menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek analisis, dengan mengaplikasikannya pada data, serta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data.

2. Transferabilitas yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain.

3. Dependability yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

4. Konfirmabilitas yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif

F. Variabel penelitian

Variabel penelitian kualitatif ini adalah eksistensi, peranan, Pengadilan Agama kota Cirebon, Hukum perdata Islam

G. metode analisis data

Analisis data menggunakan deskriptif analisis, dan tipe analisis nonparametrik, dan tidak ditujukan untuk generalisasi. Artinya, hasil penelitian kualitatif terbatas dalam hal generalisasi dan hanya berlaku untuk sampel yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah dan profil Pengadilan Agama Kota Cirebon tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif teori hukum ketatanegaraan dan teori eksistensi, eksistensi Peradilan Agama mengikuti teori hukum ketatanegaraan yang digunakan serta mengikuti situasi politik hukum, karena peradilan agama selalu berhubungan dan berhadapan dengan negara atau peradilan agama vis to vis teori hukum ketatanegaraan. Sebenarnya dalam kajian fiqh peradilan tugas dan fungsi peradilan Islam bukan hanya hukum perdata Islam tetapi seluruh hukum Islam seperti Peradilan Agama masa kesultanan Cirebon tugas dan fungsinya bukan hanya hukum perdata Islam karena teori hukum yang digunakan adalah teori hukum ketatanegaraan Islam, namun pada masa penjajahan Belanda Peradilan Agama juga masih eksis tetapi urusan tugas dan fungsi berbeda yaitu berdasar politik hukum Belanda bahwa keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura dikukuhkan dengan Staatsblad 1882 Nomor 152 juncto Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610, yaitu hanya mengurus perkawinan, namun peradilan agama kota Cirebon pada kolonial Belanda masih tetap ada. Kemudian pada masa kemerdekaan Peradilan Agama Kota Cirebon hubungan dengan negaranya keluar dari teori politik hukum Belanda bergabung dengan Negara Republik Indonesia, namun karena Negara Indonesia yang baru Merdeka ini, teori hukum ketatanegaraannya yang digunakan bukan teori ketatanegaraan Islam, maka eksistensi, tugas dan peranannya tidak jauh dari pada masa Belanda, namun Setelah Indonesia merdeka keberadaan Pengadilan Agama dikuatkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 29), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Keempat/10 Agustus 2002), Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

B. Eksistensi Peradilan Agama Kota Cirebon dalam penerapan hukum perdata Islam sejak berdirinya sampai sekarang

Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam penerapan Hukum Islam bahwa Pengadilan Agama Kota Cirebon telah eksis sejak Islam ada di Indonesia atau sejak Agama Islam masuk ke Bumi Nusantara ini yaitu sejak abad ke tujuh Masehi atau

bertepatan dengan abad ke satu Hijriyah. Pada saat itu Wilayah Nusantara dikuasai oleh para Sultan, antara lain di Cirebon. Hukum Islam diberlakukan di dalam Wilayah kekuasaannya masing-masing. Sultan sebagai penanggung jawabnya dan untuk urusan yang berkenaan dengan hukum Islam seperti hukum keluarga, perkawinan, waris dan wakaf maka diangkatlah penghulu sebagai qadhi syari'ah dan pemberi fatwa Agama. Pada saat VOC datang ke Indonesia kebijaksanaan yang telah dilaksanakan oleh para Sultan tersebut tetap dipertahankan, dan keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura dikukuhkan dengan Staatsblad 1882 Nomor 152 juncto Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610.

Setelah Indonesia merdeka keberadaan keeksisian Pengadilan Agama Kota Cirebon dihubungkan dengan teori ketatanegaraan yang digunakan di Indonesia, dikuatkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 29), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Keempat/10 Agustus 2002), Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985,

Salah satu pijakan awal yang krusial dalam hal eksistensi kemapanan peradilan agama secara kelembagaan adalah kodifikasi peraturan-peraturan tentang peradilan agama ke dalam UU No.7 tahun 1989 mengenai peradilan agama. Dengan kodifikasi tersebut, maka peradilan agama memperoleh pengakuan hukum yang luas sebagai lembaga hukum yang otoritatif dan independen. Implikasi lebih jauh dari undang-undang tersebut adalah adanya transparansi mengenai yurisdiksi peradilan agama dalam dinamika hukum nasional, sehingga putusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal inilah yang sesungguhnya mengawali kiprah nyata peradilan agama dalam rangka penegakan supremasi hukum secara massif (wawancara dengan Pansek PA Kota Cirebon 8 okt 2015)

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Adalah sebagai eksistensi kemapanan dianggap mengalami peningkatan karena peningkatan wilayah peranannya sebagai lembaga penerapan hukum perdata Islam bagi umat Islam yang mencari keadilan

Terkait adanya perkara ekonomi syari'ah pada PA Cirebon, apakah SDM yang professional dalam bidang tersebut sudah terpenuhi? Karena pada dasarnya hakim itu tidak terlepas dari sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang mendukungnya, jadi sepanjang hal itu berkaitan dengan hukum acaranya mau tidak

mau harus siap, dan kami (hakim hakim pengadilan agama cirebon) sudah banyak yang diikutsertakan dalam pelatihan ekonomi syari'ah, sehingga alhamdulillah dari mulai adanya permasalahan ekonomi syariah akhir tahun 2014 di PA cirebon ini ada 5 perkara ekonomi syari'ah sudah selesai, kebetulan perkara ekonomi syari'ah yang masuk dalam PA cirebon ini tidak terlalu rumit dan mungkin pengacaranya juga belum begitu mendalami tentang ekonomi syari'ah padahal itu pada dasarnya sama dengan perbankan di pengadilan negeri, jika pengacara tersebut menguasai tentang hukum perdata di pengadilan umum, itu mestinya mereka harus menguasai juga, hanya saja ini bedanya dengan embel embel syariah. Jadi karena mungkin pengacaranya belum terlalu menguasai sehingga gugatan tersebut belum memenuhi dari segi formalitasnya, dan karena belum memenuhi dari segi formalitasnya oleh pengadilan agama kota cirebon gugatan tersebut tidak dapat diterima, jadi perkara tersebut belum sampai pembuktian sudah diberhentikan terlebih dahulu, memang ada perkara yang sudah sampai pembuktian tapi pada akhirnya juga dinyatakan tidak diterima karena secara formalitas tidak memenuhi unsur unsur gugatan misalnya kabur, error in personal (salah mengajukan / menyatakan orang ditarik sebagai para pihak) jadi secara prinsip hakim hakim PA cirebon sudah siap untuk menangani ekonomi syari'ah. Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi peradilan agama kota cirebon telah menjadikan ummat Islam kota cirebon terlayani dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah serta ekonomi syari'ah. Peradilan agama hendak menegakkan substansi nilai-nilai hukum perdata Islam yang mewarnai kehidupan ummat Islam

Perubahan signifikan dibidang ketatanegaraan dalam sistem peradilan adalah penyatu atapan semua lembaga peradilan (one roof system) di bawah mahkamah agung RI. Reformasi sistem peradilan tersebut diawali dengan dimasukkannya pasal 24 (2) UUD 1945 dalam amandemen ketiga UUD 1945 dan dilanjutkan dengan disahkannya UU nomor 4 Tahun 2005 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan PTUN dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Konsekuensi dari penyatu-atapan lembaga peradilan adalah pengalihan organisasi, administrasi dan finansial peradilan agama dari departemen agama kemahkamah agung. Pengalihan tersebut sebagai bagian dari perwujudan reformasi hukum untuk menciptakan kelembagaan negara yang lebih kondusif bagi

tercapainya tatanan yang lebih demokratis dan transparan, telah beralih kemahkamah agung hubungan antara peradilan agama dengan departemen agama akan terus berlangsung melalui peran pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang. Untuk memberikan ketetapan (itsbat) kesaksian melihat bulan (rukyat Al-hilal) dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah (terutama dalam awal bulan ramadhan, syawal dan zulkhijjah). Pelaksanaan rukyat hilal dilakukan oleh departemen agama dan lembaga/ormas-ormas Islam sedangkan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal (bulan baru) menjelang awal bulan hijriyah dilakukan oleh pengadilan agama. Berkaitan dengan hisab rukyat pengadilan agama juga dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Disisi lain, baik pengadilan agama maupun departemen agama juga mempunyai kesamaan fungsi dalam pembinaan keluarga sakinah Apakah gedung PA Cirebon sudah memenuhi standarisasi Mahkamah Agung? Jika belum memenuhi standarisasi apakah mengganggu kinerja atautkah tidak? Gedung pengadilan agama Yang berada di jalan DR Ciptomangunkusumo no 42 Cirebon ini belum sesuai dengan harapan, walaupun belum memenuhi harapan tidak mengganggu kinerja, kinerja tetap berjalan sesuai dengan aturan. Tetapi karena keadaan gedung yang belum memenuhi standar menjadikan kinerja PA Cirebon seadanya. Insya Allah pada tanggal 9 Desember 2015 pengadilan agama Cirebon akan menempati gedung baru di jalan bypass, dan gedung tersebut sangat representative, sudah sesuai dengan standar mahkamah agung, gedung dan ruangan ruangan yang sudah bagus, sudah ada penyerapan udara, dan gedung PA yang baru ini menjadi percontohan nasional, karena fasilitas di gedung baru ini serba modern. Untuk ruangan hakim disendirikan, untuk ruangan penerimaan perkara dalam ruangan yang disendirikan (dikotakkan sendiri sendiri). (Wawancara dengan Hakim PA Kota Cirebon, Drs.H. Muchamadun 29-10-2015)

C. Peranan Peradilan Agama Kota Cirebon dalam penerapan hukum perdata Islam sejak berdirinya sampai sekarang

Untuk merespon dinamika dan kebutuhan masyarakat, undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama memberikan perluasan peranan kewenangan sebagaimana terdapat dalam pasal 49. Pengadilan agama bertugas dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah.

Dalam bidang perkawinan Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan masalah penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sebelum lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak yang merupakan bagian dari bidang perkawinan sering dipertanyakan banyak pihak meskipun telah lama diperaktekkan. Kini perkara pengangkatan anak di peradilan agama telah mendapat landasan hukum yang kuat dan jelas

Pada awal pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2006 wacana yang berkembang dalam antara lain pemberian kewenangan sengketa bank syariah kepada Pengadilan Agama seiring tumbuhnya bank-bank syariah di indonesia. Dalam perkembangannya tidak hanya mencakup bank syariah, namun meliputi ekonomi syariah yang kemudian diakomodir dalam undang-undang ini. Jika diperinci kewenangan Pengadilan Agama dalam ekonomi syariah mencakup: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, dan bisnis syariah. Rumusan pasal UU Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, berbeda dengan kewenangan sebelumnya yang terbatas pada perkara tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara pidana, terutama berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan dan peraturan di bawahnya. Ketentuan pidana yang dimaksud seperti ancaman pidana terhadap pelaku pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah, namun pelaksanaannya tidak berjalan efektif. Pelanggaran perkawinan sangat jarang yang diproses, walaupun ada biasanya diproses dengan ketentuan pasal 279 KUHP, sehingga diperlukan payung hukum dan institusi yang diharapkan dapat menegakkan aturan mengenai pelanggaran perkawinan yaitu Pengadilan Agama.

Perubahan signifikan lainnya dari UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah mengenai subjek hukum yang diperluas menjadi tidak hanya orang Islam dalam pengertian teologis, akan tetapi termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara suka rela kepada hukum Islam. Pilihan hukum dalam perkara waris (alinea 2 penjelasan umum UU Nomor 7 Tahun 1989) dihilangkan. Dengan demikian perkara kewarisan bagi orang Islam mutlak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama yang semakin luas harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur pengadilan, sarana dan

prasarana yang memadai, serta ketentuan hukum yang aplikatif. Dengan demikian paradigma baru peradilan agama benar-benar dapat menjawab tuntutan dan problem hukum yang berkembang di masyarakat.

Jadi untuk lebih rinci tentang peranan Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam penerapan hukum perdata Islam sejak adanya Pengadilan sampai sekarang adalah sebagai berikut bahwa terjadi peristiwa penting yang berkenaan dengan berlakunya sebagian hukum Islam dan penyelenggaraan peradilan Islam di Indonesia. Peristiwa itu adalah pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam upaya mewujudkan suatu tatanan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ini berangkai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terdiri atas 7 bab yang meliputi 108 pasal. Ketujuh bab tersebut berisi Ketentuan Umum (Bab I), Susunan Pengadilan (Bab II), Kekuasaan Pengadilan (Bab III), Hukum Acara (Bab IV), Ketentuan-ketentuan Lain (Bab V), Ketentuan Peralihan (Bab VI), dan Ketentuan Penutup (Bab VII). Undang-undang ini, sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, memuat beberapa perubahan penting dalam penyelenggaraan Peradilan Islam di Indonesia, Perubahan-perubahan tersebut di antaranya berkenaan dengan (1) dasar hukum penyelenggaraan peradilan; (2) kedudukan badan Peradilan; (3) susunan pengadilan; (4) kedudukan, pengangkatan, dan pemberhentian hakim; (5) kekuasaan pengadilan; (6) hukum acara peradilan; (7) penyelenggaraan administrasi peradilan; dan (8) perlindungan terhadap wanita (Cik Hasan Bisri, 1997: 126).

Wewenang Pengadilan Agama ditegaskan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah". Dengan demikian, jelaslah bahwa wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus

dan menyelesaikan permasalahan kaum Muslim dalam bidang-bidang tertentu, yakni bidang perkawinan dan berbagai hal yang terkait dengannya, bidang kewarisan dan berbagai hal yang terkait dengannya, serta bidang perwakafan dan berbagai hal yang terkait dengannya. Ketiga bidang tersebut diperjelas dengan keluarnya Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan.. Menurut ketentuan pasal 49 juga dijelaskan bahwa wewenang Pengadilan Agama hanya mengadili perkara-perkara tersebut di tingkat pertama. Adapun pada tingkat banding (yang lebih tinggi) yang menanganinya adalah Pengadilan Tinggi Agama (pasal 51).

Peranan pengadilan Agama Kota Cirebon sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Yaitu sebagai Lembaga Pengadilan tingkat pertama untuk mengadili bagi umat Islam di wilayah yudiksi kota Cirebon di bidang hukum perdata Islam, bahkan dalam sejarahnya wewenang Pengadilan Agama kota Cirebon ini tidak begitu saja langsung menangani perkara-perakara seperti di atas, akan tetapi melalui proses yang cukup panjang, yaitu mulai, keberadaan Pengadilan Agama kota Cirebon ini, ada sejak masa kesultanan Cirebon yang mengadili bukan hanya hukum perdata Islam saja tetapi seluruh hukum Islam bagi umat Islam dan non muslim di wilayah yuridiksi kesultanan Cirebon. Dan pada tahun 1882 sejak masih berbentuk *Priesterrad* (Majelis atau Pengadilan Pendeta) yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Perkara- perkara yang ditangani ditentukan oleh Pengadilan Agama sendiri, yaitu perkara- perkara yang berkaitan dengan perwalian, kewarisan, hibah, shadaqah, baitulmal, dan wakaf (Sajuti Thalib, 1980: 25). Jadi, wewenang Pengadilan Agama sudah meliputi ketiga perkara yang disebut dalam Kompilasi Hukum Islam yang ada sekarang. Pada tahun 1922 pemerintah Belanda membentuk suatu komisi yang bertugas meninjau kembali kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama. Komisi yang pada hakekatnya dikuasai penuh oleh Betrand ter Haar ini berhasil melaksanakan tugasnya dan memberi rekomendasi kepada gubernur jenderal Hindia Belanda untuk meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama. Tujuan Pokok dari saran komisi tersebut adalah menyangkut wewenang Pengadilan Agama, yakni pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili masalah wakaf dan masalah kewarisan

Pencabutan ini, menurut para pemimpin Islam, merupakan langkah mundur ke zaman Jahiliyah dan dipandang menentang sendi-sendi iman orang Islam

Pada tahun 1937 keluar Stbl. 1937 No. 116. Dengan Stbl. ini wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili masalah kewarisan dialihkan kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian, wewenang Pengadilan Agama hanya mengurus masalah perkawinan. Sementara itu di Kalimantan Selatan didirikan Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar dengan Stbl. 1937 No. 638 dan 639 yang wewenangnya persis seperti Pengadilan Negeri.

Setelah Indonesia merdeka, langkah yang diambil pemerintah Indonesia ialah menyerahkan pembinaan Peradilan Agama dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama melalui PP. 5/SD/1946. Tahun 1948 keluar Undang-undang No. 190 yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, meskipun hal ini tidak pernah berjalan. Tahun 1957 pemerintah mengatur pemberntukan Peradilan Agama di luar Jawa Madura dan Kalimantan Selatan melalui PP. No. 45 Tahun 1957. Wewenang Peradilan Agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan meliputi perkara-perkara (1) nikah, (2) talak, (3) rujuk, (4) fasakh, (5) nafkah, (6) mas kawin, (7) tempat kediaman, (8) mut'ah, (9) hadlanah, (10) perkara waris, (11) wakaf, (12) hibah, (13) sedekah, dan (14) baitulmal

Berdasarkan pemaparan tentang perana Pengadilan Agama di atas maka pada dasarnya, Peranan pengadilan Agama Kota Cirebon memang sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Adapun penilaian masyarakat, memang yang namanya masyarakat pencari keadilan, yang menang pasti merasa adil sedangkan yang kalah pasti merasa tidak adil, sehingga mereka yang merasa kurang puas mengajukan upaya hukum, itu memang lumrah, tapi yang jelas pengadilan Agama Cirebon sudah menjalankan aturan sesuai dengan peraturan perundang undangan, sedangkan mengenai harapan masyarakat, ya memang harapan masyarakat apa yang diajukan dimohonkan supaya dikabulkan, hanya saja pengadilan tidak serta merta mengabulkan, akan tetapi harus memproses terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pengadilan Agama kota Cirebon, alhamdulillah pada awal tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu dengan sudah mulai menangani perkara ekonomi syari'ah, sudah ada 4 perkara ekonomi syari'ah yang ditangani dengan masalah perbuatan melawan hukum dari pihak Bank yang dianggap melawan perbuatan hukum oleh pihak nasabah, sehingga nasabah tersebut mengajukan ke pengadilan agama Cirebon, dan alhamdulillah

semua perkara ekonomi syariah tersebut sudah bisa ditangani oleh pengadilan agama kota Cirebon dan putusannya sesuai dengan hukum perkaranya.

